

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Santi Rahma¹, Dewu Asri Puannandini²

santirahma0110305@gmail.com¹, dephee.bringka@gmail.com²

Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Kesehatan dalam perspektif asasi merupakan upaya nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan yang komprehensif. Sebagai hak asasi manusia pertama yang mempengaruhi perilaku dan karma manusia, kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk memahami hakikat kebijakan nasional di bidang pelayanan kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang memadai dan unggul. Menjunjung tinggi, menjaga, dan memenuhi kewajiban nasional dilakukan dengan menerapkan norma hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.
Kata Kunci: tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan.

***Abstract:** National commitment to health from the perspective of human rights is a national endeavor to meet the needs of the people, especially in terms of comprehensive health care. As the first human right that affects human behavior and karma, health is regarded as sacred. This study employs normative law research methodology to understand the nature of national policy about health care. The research findings indicate that the government should be fully committed to ensuring that every citizen of the country has equitable access to adequate and excellent health care. Paying heed to uphold, safe guard, and fulfill national obligations is done by putting human rights norms into practice at the forefront of health care.*

***Keywords:** state responsibility for health insurance.*

PENDAHULUAN

Tanggung bertanggung jawab untuk menjamin melayani kesehatan yang layak dan optimal dan memadai bagi sebuah warga negara. kesehatan dilihat sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar yang sejalan dengan harkat dari martabat warga negara serta peran umat warga negara sebagai utusan Allah Ta'ala Sebagai bagian mengenai kebutuhan dasar masyarakat, masyarakat, negara wajib melindungi, memelihara, dan menjunjung tinggi kesehatan manusia negara wajib melindungi, melestarikan, dan menegakkan kesehatan manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan kesehatan nasional harus diprioritaskan kebijakan kesehatan seperti akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan. Untuk menjunjung tinggi, menjaga, dan memenuhi kewajiban negara dalam milik bangsa melindungi kesehatan warga negara, pemerintah harus berpegang pada prinsip - prinsip tersebut. kewajiban untuk melindungi kesehatan warga negara, pemerintah harus mematuhi prinsip - prinsip ini.

Dalam kenyataan, masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan. Keterbatasan akses, kualitas, dan ketersediaan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. sebab itu, diharuskan adanya upaya yang lebih baik dan sistematis dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta memenuhi tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan.

kajian terhadap penelitian terdahulu, merupakan kajian asli, subjektif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka undang - undang formal, yaitu Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan pendekatan implisit terhadap pelanggaran HAM.

penelitian dalam jurnal yang di tulis oleh tampubolon nathanael. penulis membahas tanggungjawab negara terhadap jaminan kesehatan. fokus utama dari penulisan tersebut adalah Standar kesehatan tertinggi yang kesehatan dicapai adalah hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional hal ini berlaku di Indonesia. Dari perspektif hak masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan optimal, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi ini. Hal ini dilakukan dengan menerapkan norma HAM tentang hak perawatan kesehatan. yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional hal ini berlaku di Indonesia. Dari perspektif hak rakyat perang untuk memperoleh perawatan kesehatan yang memadai dan optimal, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan menerapkan norma HAM tentang hak perawatan kesehatan.

penulis disertai, afandi hernandi. Membahas Undang-undang Hukum tahun 1945 yang memperkenalkan materi perlindungan hak asasi manusia semakin mengungkap pelanggaran hak - hak tersebut, termasuk hak atas kesehatan dalam rumah. yang memperkenalkan materi perlindungan hak asasi manusia semakin mengungkap pelanggaran terhadap hak - hak tersebut, termasuk hak atas kesehatan rumah. Pengetahuan yang ada masih sangat umum, sehingga diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk memahami permasalahan yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini belajar berfokus pada dua isu pertama, bagaimana hukum dapat melindungi kesehatan di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Kedua, bagaimana komitmen negara terhadap perawatan kesehatan pasca perubahan UUD 1945 dapat diwujudkan berfokus pada dua isu.

Dalam studi ini belajar, penulis akan membahas kebijakan negara tentang kesehatan. penulis akan membahas kebijakan negara tentang kesehatan kewajiban negara untuk melindungi kesehatan manusia dari sudut pandang individu serta langkah - langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi kewajiban tersebut. penulis akan membahas hambatan dan upaya tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan kesehatan nasional dan solusi potensial untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan nasional di bidang kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk memahami bagaimana seharusnya pemerintah melindungi hak - hak warga negara guna melindungi kesehatannya. Temuan penelitian harus menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan serta memperkuat kebijakan negara di bidang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, keaburan dan konflik norma. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah hukum. materi adalah yang mempunyai kualitas otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Asas hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu: Prinsip - prinsip dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang - undangan terkait pelayanan kesehatan dan peraturan perundang undangan terkait, yaitu:

- a) Dasar Undang-Undang 1945 Peraturan perundangan nomor 36 dari Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- b) peraturan nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- c) peraturan nomor 40 tahun 2004 tentang sistem kesehatan nasional ;
- d) Peraturan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Departemen Penegakan Kesehatan tentang kesehatan;
- e) peraturan nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia ;
- f) peraturan nomor 40 tahun 2004 mengenai sistem kesehatan nasional ;
- g) peraturan nomor 24 tahun 2011 mengenai departemen penegakan Kesehatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab negara di indonesia

Hak dasar yang cepat untuk hidup sehat adalah hak kesehatan, sebagaimana setiap warga negara yang harus mendasar. Tubuh dan pikiran yang sehat dan pikiran yang akan memungkinkan memudahkan setiap warga negara dalam beraktivitas dan setiap manusia sehari-hari. aspek Salah satu dari kebutuhan untuk hidup mandiri adalah kesehatan. memiliki kehidupan yang mandiri adalah kesehatan. tertentu Hak benar ini berfungsi sebagai salah satu pilar dalam pemeliharaan kesehatan. berfungsi sebagai salah satu landasan dalam pemeliharaan kesehatan.

Tanggung tanggung untuk iniatas hak, yang merupakan bangsa atau pemerintahan, digaris bawahi dengan mengkaji prospek hak kesehatan manusia dalam penelitian ini. hak ini, yaitu negara atau pemerintah, ditegaskan dengan mengkaji hak kesehatan manusia yang prospektif dalam kajian ini. Norma tentang persyaratan korelatif hak primer ini terkait dengan Pasal 14 Bab IV sampai dengan Pasal 20.36 UU No.36 Tahun 2009. upaya gigih pemerintah untuk berdialog, bernegosiasi, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program kesehatan yang adil dan komprehensif bagi masyarakat umum.

Untuk bisa dilaksanakan. Undang- undang yang telah telah dilewati dan dibuat dan diciptakan berbagai instansi pemerintah kemudian diubah menjadi dokumen tertulis dan juga mempunyai kekuatan hukum

Seperangkat aturan apa pun mengatur perlu dipertimbangkan dengan hati - hati untuk memperhitungkan semaksimal mungkin kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan aktor mana pun yang terlibat dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi. Kekuasaan dan kepentingan jaminan kesehatan tidak mempengaruhi keberlangsungan kebijakan. Hal ini dijelaskan karena semuanya ditangani oleh Biro Kesehatan Kantor Presiden dan

didistribusikan oleh Departemen Kesehatan yang beroperasi secara rahasia.

Hal terbukti bahwa sebagian besar orang masuk sebagian Masyarakat meyakini adanya meyakini keberadaan JKN membuat pelayanan kesehatan menjadi gratis. JKN menjadikan pelayanan kesehatan gratis. Namun, fokus fokus nasihat pemerintah lebih pada pelaksanaan dan kemajuan program, terutama yang berkaitan dengan kategori masyarakat miskin. JKN sebelumnya sudah menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat miskin, karena dengan adanya JKN, masyarakat kurang mampu dan terlantar dapat terjamin kesehatannya oleh negara.

Implementasi tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam berbagai sistem pemerintahan dan kebijakan kesehatan dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a) Sistem Jaminan Sosial Nasional : Pemerintah pemerintah berkomitmen penuh untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional untuk kepentingan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional. adalah berkomitmen penuh dalam melaksanakan sistem jaminan sosial nasional untuk kepentingan kesehatan masyarakat umum melalui sistem jaminan sosial nasional. pekerjaan sedang dilakukan tersebut dengan menerapkan dengan menerapkan beberapa strategi dan rencana kesehatan masyarakat yang telah disetujui pemerintah untuk mencapai Tingkat Kesehatan Indonesia 2010–2014 beberapa strategi dan rencana untuk kesehatan masyarakat yang telah disetujui oleh pemerintah untuk mencapai Tingkat Kesehatan Indonesia 2010–2014.
- b) Tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan, kemauan dan tekad untuk mencapai derajat kesehatan yang diinginkan sebagai dokter umum. Sistem kesehatan nasional di Indonesia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, kesehatan, dan vitalitasnya. Kebijakan Kesehatan Bangsa: Pada tanggal 2 Maret 2004, Pemerintah mengumumkan perubahan Sistem Kesehatan Nasional melalui Kep.Men.Kes. RI No.131/Men.Kes/SK/II/2004. Tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum ke tingkat yang semakin tinggi. mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, keuletan, dan ketekunannya guna memenuhi standar barang publik yang semakin tinggi
- c) Tanggung Jawab Politik: Negara terkait dengan adanya pertanggungjawaban mengatasi semua masalah dalam penyediaan sistem efektif kesehatan yang kesehatan atau saluran politik awal. Sebagai organisasi Nasional politik dan diplomatik politik, kita harus mengembangkan strategi politik yang menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan menghormati hak asasi manusia dan organisasi diplomatik, kita harus mengembangkan strategi politik yang menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan menghormati hak asasi manusia. kesehatan nasional mengingat pentingnya kebijakan kesehatan nasional. untuk perdamaian dan politik, negara harus mengembangkan strategi politik yang menjunjung tinggi dan memperkuat kebijakan kesehatan nasional mengingat pentingnya kebijakan kesehatan nasional.
- d) Bangsa ini dilengkapi dengan elastisitas ekonomi untuk menyerap dan menyediakan seluruh biaya yang berhubungan dengan kesehatan dalam kisaran pengeluarannya. Untuk rangka untuk berkembang dan memelihara fasilitas kesehatan, kesehatan, pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai baik untuk Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai baik untuk Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD).
- e) Tanggung Jawab Moral: Sebagai bagian hak asasi manusia, suatu bangsa wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dalam rangka melindungi, membina, dan prinsip-prinsip moral untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kesehatan menjaga kesehatan manusia. Penyelenggaraan penerapan tanggung jawab pemerintah tersebut tidak saja penting, namun juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat umum sebagai upaya menjaga harkat dan martabat manusia dari itu pemerintah tanggung jawab tidak hanya penting,

tetapi juga akan memainkan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat umum sebagai sarana untuk menjaga martabat manusia.

Dalam melaksanakan kebijakan tanggung jawab negara milik bangsa di bidang kesehatan, pemerintah harus memperhatikan berbagai kebijakan tanggung jawab dalam rangka menegakkan, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara untuk melindungi kesehatan warga negara. Kebijakan tanggung jawab di bidang kesehatan, melindungi kesehatan warga negara

2. Hambatan dan upaya yang dihadapi negara

Hambatan dan upaya yang dihadapi negara dalam memenuhi jaminan kesehatan

Hambatan:

kendala atau masalah yang timbul dalam operasi suatu negara, khususnya di bidang perselisihan perburuhan. hambatan atau kendala yang timbul dalam operasi suatu negara, khususnya di bidang perselisihan perburuhan. Berdasarkan pada analisis artikel tersebut analisis hasil, sejumlah masyarakat yang belum mendaftar Program Kesehatan Nasional diketahui menjadi penyebabnya. sebuah angka Banyaknya masyarakat yang belum mendaftar Program Kesehatan Nasional diketahui sebagai penyebabnya. Beberapa sedikit faktor yang menjadi kendala program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain proses pengajuan, manfaat yang diakui, dan pembayaran premi. dari Faktor - faktor yang menjadi kendala program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain proses pengajuan, manfaat yang diakui, dan pembayaran premi.

JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Ada beberapa beberapa cedera dan insiden cedera terjadi, antara lain cedera internal yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri dan cedera eksternal yang disebabkan oleh kekuatan luar dan insiden yang terjadi,

- a) a) Berkurangnya Anggaran : Berkurangnya anggaran berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan peduli.
- b) Sarana dan Prasana Batasan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pandurasi kesehatan dengan sarana dan prasana batasan kesehatan
- c) Modal: Sumber daya manusia yang berkurang dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan standar layanan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan
- d) Informasi yang Tidak Akurat : Informasi yang tidak informasi akurat dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan standar layanan kesehatan dan menurunkan aksesibilitas masyarakat umum terhadap layanan kesehatan. dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan standar layanan kesehatan dan menurunkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.
- e) Pengerbatasan Kebijakan: Pengerbatasan kebijakan adalah hambatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Upaya:

kerjasama antara BPJS Kesehatan sebagai badan kebijakan kesehatan negara dan penyedia asuransi kesehatan swasta lada di Indonesia sangat diperlukan. memberikan kesempatan untuk terus meningkatkan cakupan asuransi kesehatan nasional, khususnya di sektor informal.

Perluasan Sistem Nasional Jaminan Sosial Keamanan sosial: Perluasan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat menjadi upaya untuk meningkatkan standar batangan kuantitas pelayanan kesehatan serta aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dankuantitas pelayanan kesehatan serta aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sistem: Perluasan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan standar dan kuantitas pelayanan kesehatan serta aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan a) Kebijakan Nasional Pengembangan Kesehatan Kebijakan Nasional Kesehatan dapat meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan kesehatan serta memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

- a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan: Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan memberi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan
- b) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengeksploitasi sumber daya manusia adalah komponen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat umum terhadap kesehatan. mempromosikan kesehatan dan meningkatkan umum aksesibilitas aksesibilitas publik terhadap layanan kesehatan ke layanan kesehatan
- c) Pengumpulan Informasi : Pengumpulan informasi dapat digunakan untuk meningkatkan standar meningkatkan standar pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat umum terhadap layanan kesehatan. kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab negara milik bangsa di bidang kesehatan, pemerintah harus melaksanakan berbagai tindakan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban negara dalam mempertahankan kedaulatan warga negaranya. Di bidang kesehatan, pemerintah harus melaksanakan berbagai tindakan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban negara dalam mempertahankan kedaulatan warga negaranya.

KESIMPULAN

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin seluruh warga negara memiliki akses yang adil kepada pelayanan kesehatan yang memadai dan optimal. Sebagai salah satu hak asasi manusia yang berguna pada hakikat dan keberadaan manusia, kesehatan diakui memiliki arti "hak asasi manusia atas kesehatan", sehingga bangsa harus menghormati, menjunjung tinggi, dan mempertahankan hak tersebut. terhadap kesehatan," maka negara harus menghormati, menjunjung tinggi, dan membela hak ini. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terhadap hak atas kesehatan. Negara harus menjamin hak kesehatan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, serta sertamenjamin informasi kesehatan. Menjamin permintaan informasi kesehatan. Untuk memenuhkan kedaulatan negara di bidang kesehatan, norma - norma terkait HAM harus dipatuhi. Untuk menegakkan kedaulatan negara di bidang kesehatan, norma- norma terkait HAM harus dipatuhi. Dengan demikian ayat 1 ayat 1 Undang - itu Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan yang tidak bergantung pada faktor tubuh, sosial, dan budaya yang setiap individu menjadi lebih aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 111-121.
- Tampubolon, Natanael. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." (2022).
- Affandi, Hernadi. "Implementasi hak atas kesehatan menurut undang-undang dasar 1945: antara pengaturan dan realisasi tanggung jawab negara." *Jurnal Hukum Positum* 4.1 (2019): 36-56.
- Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna gappa*, 53-63.
- Setyowati, Retno Kus. "Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan." *Justice Voice* 1.1 (2022): 1-9.
- Basuki, Eko Wahyu, and Nunik Retno Herawati. "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 5.04 (2016): 221-230.